



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK

NOMOR SE-24/PJ/2013

TENTANG KODE NOTA PENGHITUNGAN DAN KODE KETETAPAN PER JENIS PAJAK

LAMPIRAN I
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : SE-24/PJ/2013
TENTANG : KODE NOTA PENGHITUNGAN DAN
KODE KETETAPAN PER JENIS PAJAK

TABEL KODE NOTA PENGHITUNGAN

NOMOR KODE	KETERANGAN
1.1.5	Pemeriksaan Kantor yang dilakukan oleh Fungsional Pemeriksa KPP
1.2.3	Pemeriksaan Lapangan yang dilakukan oleh Tenaga Ahli yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak
2.0.2	Pemeriksaan Lapangan yang dilakukan oleh Tim Gabungan DJP dan Instansi Lain
2.0.4	Pemeriksaan Lapangan yang dilakukan oleh Fungsional Pemeriksa Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak
2.0.5	Pemeriksaan Lapangan yang dilakukan oleh Fungsional Pemeriksa KPP
2.0.7	Pemeriksaan Bukti Permulaan yang dilakukan oleh Tenaga Fungsional Pemeriksa/Penyidik Kantor Wilayah
3.0.2	Penelitian yang dilakukan oleh Seksi Penagihan
3.0.3	Penelitian yang dilakukan oleh Seksi Pengawasan dan Konsultasi
3.0.4	Penelitian yang dilakukan oleh Seksi Pelayanan
4.0.1	Verifikasi yang dilakukan oleh Petugas Verifikasi KPP

LAMPIRAN II
 SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
 NOMOR : SE-24/PJ/2013
 TENTANG : KODE NOTA PENGHITUNGAN DAN
 KODE KETETAPAN PER JENIS PAJAK

TABEL KODE KETETAPAN PER JENIS PAJAK

I. PAJAK UMUM

JENIS PAJAK		JENIS SURAT KETETAPAN				
		STP	SKPKB	SKPKBT	SKPLB	SKPN
A. PPh Umum						
1	PPh Pasal 21	101	201	301	401	501
2	PPh Pasal 22	102	202	302	402	502
3	PPh Pasal 22 Impor atas Impor/Perolehan	122	222	322	422	522
4	PPh Pasal 23	103	203	303	403	503
5	PPh Pasal 26	104	204	304	404	504
6	PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi	105	205	305	405	505
7	PPh Pasal 25/29 Badan	106	206	306	406	506
8	PPh Pasal 25/29 Badan Minyak Bumi	116	216	316	416	516
9	PPh Pasal 25/29 Badan Gas Bumi	136	236	336	436	536
B. PPN						
1	PPN	107	207	307	407	507
2	PPN yang tidak seharusnya dibebaskan/tidak dipungut		217	317		
3	PPN atas:					
	3.1 Impor	127	227	327	427	527
	3.2 Penyerahan Aktiva Pasal 16 D*)	137	237	337	437	537
	3.3 Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud Dari Luar Daerah Pabean	167	267	367	467	567
	3.4 Pemanfaatan JKP Dari Luar Daerah Pabean	177	277	377	477	577
	3.5 Pemungutan Pajak Oleh Pemungut Pajak	187	287	387	487	587
	3.6 Pembayaran kembali Pajak Masukan bagi PKP yang gagal berproduksi	147				
	3.7 Tanggung Jawab Secara Renteng		297			
C. PPnBM						
1	PPnBM	108	208	308	408	508
2	PPnBM yang tidak seharusnya dibebaskan/tidak dipungut.		218	318		
3	PPnBM atas :					
	3.1 Impor	128	228	328	428	528
	3.2 Pemungutan Pajak Oleh Pemungut Pajak	148	248	348	448	548
	3.3 Tanggung Jawab Secara Renteng		298			
D. Bunga/Denda Penagihan						
1	Bunga Penagihan	109				
2	Denda Penagihan	110				
E. PPh Final						
1	PPh Final Pasal 4 ayat (2)	140	240	340	440	540
2	PPh Final Pasal 15	141	241	341	441	541
3	PPh Final Pasal 19	142	242	342	442	542
4	PPh Final Pasal 21	143	243	343	443	543
5	PPh Final Pasal 22	144	244	344	444	544
6	PPh Final Pasal 23/26	145	245	345	445	545
7	PPh Final Pasal 26 (4) Minyak Bumi	146	246	346	446	546
8	PPh Final Pasal 26 (4) Gas Bumi	149	249	349	449	549
F. PPN Membangun Sendiri			257	357	457	557

LAMPIRAN II
 SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
 NOMOR : SE-c24/PJ/2013
 TENTANG : KODE NOTA PENGHITUNGAN DAN
 KODE KETETAPAN PER JENIS PAJAK

TABEL KODE KETETAPAN PER JENIS PAJAK

JENIS PAJAK		JENIS SURAT KETETAPAN				
		STP	SKPKB	SKPKBT	SKPLB	SKPN
G. Pajak yang seharusnya tidak terutang						
1	PPH Pasal 21				411	
2	PPH Pasal 22				412	
3	PPH Pasal 23				413	
4	PPH Pasal 26				414	
5	PPH Pasal 25/29 Orang Pribadi				425	
6	PPH Pasal 25/29 Badan				426	
7	PPH Pasal 25/29 Badan Minyak Bumi				456	
8	PPH Pasal 25/29 Badan Gas Bumi				466	
9	PPH Final Pasal 4 ayat (2)				490	
10	PPH Final Pasal 15				491	
11	PPH Final Pasal 19				492	
12	PPH Final Pasal 21				493	
13	PPH Final Pasal 22				494	
14	PPH Final Pasal 23/26				495	
15	PPH Final Pasal 26 (4) Minyak Bumi				486	
16	PPH Final Pasal 26 (4) Gas Bumi				489	
17	PPN				447	
18	PPnBM				438	
19	PPN Membangun Sendiri				497	
H. Pengembalian PPN kepada orang pribadi pemegang paspor luar negeri					807	

*) Berlaku untuk masa dan/atau tahun pajak 2006 dan sebelumnya

II. PBB

JENIS PAJAK		STP PBB	SKP PBB
PBB			
1	PBB Sektor Pedesaan	170	270
2	PBB Sektor Perkotaan	171	271
3	PBB Sektor Perkebunan	172	272
4	PBB Sektor Perhutanan	173	273
5	PBB Sektor Pertambangan	174	274
6	PBB Sektor Pabum-Migas	175	275